

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN LEGALISASI ASET UNTUL
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
(STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NUSA TIRTA SURYA

NIM. 530028482

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2022

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROGRAM TO ACCELERATE ASSET LEGALIZATION TO ESTABLISH AN ORDER OF LAND ADMINISTRATION (Case Study at Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)

Nusa Tirta Surya
Nusa_ark08@yahoo.com
Graduate Studies Program
Indonesian Open University

Introduction: Land plays an important role in the life of the Indonesian people. Given the importance of land for the survival of the community, it is necessary to provide complete regulation in terms of use, utilization, ownership and law-making related to this matter. *Purpose:* To analyze the implementation of the accelerated asset legalization program for the realization of orderly land administration at the Indragiri Hilir District Land Office. To find out the obstacles faced by the Land Office of Indragiri Hilir Regency in implementing the asset legalization program. *Method:* Researchers use this qualitative method to collect and analyze data and understanding the implementation of a government policy. The policy in this case is the activity of accelerating the legalization of land assets in Indragiri Hilir Regency. *Results:* In the 1960s since the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA), the National control in this institutional matter. When under the auspices of the Ministry Land Agency has experienced several changes in of Agrarian Affairs a policy is processed and followed up from the Central Leadership structure to the regional level (Office of Land), but when under the auspices of the Ministry of Home Affairs only through the Director General of Agrarian Affairs to the Kantah level. In addition, institutionally, the National Land Agency underwent a change in the institutional structure, which spanned a very short period of time. *Conclusion:* The implementation of the accelerated asset legalization program in the Indragiri Hilir Regency area, in terms of standard factors and policy targets, has not gone well, as can be seen from the performance achievements in 2021 as a whole, only 64.48%. Asset legalization program in Indragiri Hilir Regency in its implementation.

Keywords: Land, Legalization, Implementation.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN LEGALISASI ASET UNTUK TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN” (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)

**Nusa Tirta Surya
Program Magister Administrasi Publik
Universitas Terbuka**

Tanah memegang peranan penting bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Tujuan: Untuk menganalisis implementasi program percepatan legalisasi aset untuk terwujudnya tertib administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan program legalisasi aset. Metode: Peneliti menggunakan metode kualitatif ini guna mengumpulkan dan menganalisa data serta pemahaman terhadap implementasi suatu kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam hal ini ialah kegiatan percepatan legalisasi aset pertanahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil: Pada era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Ketika dalam naungan Kementerian Agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat hingga pada tingkat daerah (Kantor Pertanahan), namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketinggian Kantor. Di samping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentang waktunya sangat pendek. Kesimpulan: Implementasi program percepatan legalisasi aset di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari faktor standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik, terlihat dari capaian kinerja tahun 2020-2021. Program legalisasi aset di Kabupaten Indragiri Hilir pada implementasinya di lapangan ditemui berbagai hambatan dan kendala.

Kata kunci: Tanah, Legalisasi, Implementasi.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset Untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir), adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pekanbaru, 27 Oktober 2022

Menyatakan



Nusa Tirta Surya
NIM. 530028482

**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset Untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)
Penyusun TAPM : Nusa Tirta Surya
NIM : 530028482
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2023


Menyetujui

Pembimbing II



Dr. Lina Warlina, M.Ed.
NIP. 19610107 198601 2 001

Pembimbing I



Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si
NIP. 19770203 200501 2 003

Penguji Ahli



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Sos, Sc.
NIP. 195703021988071001

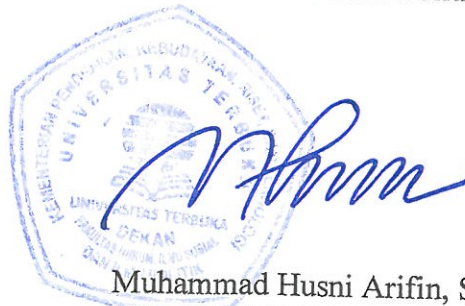
Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik dan Mengelola Program Magister Administrasi Publik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik



Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si.
NIP. 197803242001122002

Dekan Fakultas Hukum,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Muhammad Husni Arifin, S.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 197708282005011002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Nusa Tirta Surya
NIM : 530028482
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset Untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka, pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2023
Waktu : 13.00 -14.30 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**.

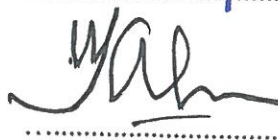
PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

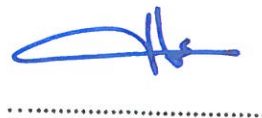
Ketua Komisi Penguji
Dr. Joko Rizki Widokarti, S.E, M.Si



Penguji Ahli
Dr. Roy Valiant Salomo, M.Sos, Sc.



Pembimbing I
Dr. Febri Yuliani, S.os, M.Si



Pembimbing II
Dr. Lina Warlina, M.Ed.



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pembimbing TAPM dari mahasiswa:

Nama/NIM : Nusa Tirta Surya

NIM : 530028482

UPBJJ : Pekanbaru

Judul TAPM : Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset Untuk Terwujudnya
Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hilir)

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa.

Pekanbaru, 21 Oktober 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Lina Warlina, M.Ed.
NIP. 19610107 198601 2 001

Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si
NIP. 19770203 200501 2 003

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah & Rusfiana. 2016. *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
- Akib, H. & Antonius, T. 2000. Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca Universitas Pepabari Makassar*, vol. 1, Agustus 2008.
- Akib, H. 2010. Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar*, vol. 1, No. 1 Thn. 2010.
- Arba, 2015. *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardani, M. N. 2019. Penyelenggaraan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 2, Issue 3, 476-492.
- Chomzah, A. A. 2003. *Hukum pertanahan seri hukum pertanahan iii-penyelesaian sengketa hak atas tanah dan seri hukum pertanahan iv-pengadaan tanah instansi pemerintah*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Daliyo, J.B. B. Arief, S. Ign. Sembirng, & Max B.S. 1992. *Hukum agraria I*. Jakarta: APTIK.
- Data BPS,7 Juni 2017, diakses dari <https://inhilkab.bps.go.id/statictable/2017/06/07/288/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir.html> pada hari Kamis, 8 Oktober 2020.
- Data BPS, 31 Desember 2021, diakses dari <https://inhilkab.bps.go.id/subject/13/keuangan.html#subjekViewTab1>, pada hari Sabtu, 18 Februari 2023.

- Denzin, N. K., & Y. S Lincoln. 2009. *Handbook of qualitative reseach*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efferin, S. 2004. *Metode penelitian untuk akuntansi:Sebuah pendekatan praktis*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Florianus S. P. S. 2007. *Tata cara mengurus sertifikat tanah*. Jakarta; Visimedia.
- Hardjito, A & Martono. 2007. *Manajemen keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Harsono, B. 2003. *Hukum agraria Indonesia; sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hisbullah, R.W. Patittingi, F. & Aspan, Z. 2018. Asas publisitas pada pelaksanaan program nasional agraria dalam rangka mewujudkan efektivitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Madani Legal Review*, vol. 2, No. 1, 40-58.
- Idham, 2004. *Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah*. Bandung : Alumni.
- Ismaya, S. 2011. *Pengantar hukum agraria*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas birokrasi publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Leo, A. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi penelitian kualiatatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, S. & Sugeng, L.P. 2009. *Manajemen pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Santoso, U. 2010. *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. 2005. *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saranga, K. A. 2019. Kualitas Pelayanan Sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, vol. 4, No. 2, 29-38.

- Soekanto, S. 1993. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumardjono, M.S.W. 2007. *Kebijakan pertanahan (antara regulasi dan implementasi)*. Jakarta : Kompas Buku.
- Soerodjo, I. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Suwitri, S. Hardi, W. & Ida, H.D. 2016. *Teori administrasi*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Thoha, M. 1997. *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tom O'D. & Keith P. Ed. 2003. *Qualitative educational research in action: Doing and reflecting* London: *RoutledgeFalmer Pub*. hlm. 44
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Wahab, S. A. 2002. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waskito & Hadi A. 2017. *Pertanahan, agraria, dan tata ruang*. Jakarta : Kencana.
- Winarno, B. 2002. *Kebijakan publik: teori dan proses*. Media Presindo. Yogyakarta.